



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

---

Tahun Sidang	: 2016 - 2017.
Masa Persidangan ke-	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	: <b>1. Sekjen Kemendikbud RI</b> <b>2. Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI.</b> <b>3. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI.</b>
Hari/Tanggal	: <b>Sabtu, 3 September 2016.</b>
Pukul	: <b>09.00 WIB s/d selesai.</b>
Tempat	: Intercontinental Jakarta Mid Plaza.
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah, S.E., M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: <b>Pendalaman RKA K/L TA 2017.</b>
Hadir	: 33 orang dari 51 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: 1. Sekjen Kemendikbud RI beserta jajarannya. 2. Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI beserta jajarannya. 3. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI beserta jajarannya.

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 09.50 WIB oleh Ferdiansyah, S.E., M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Sekjen, Dirjen Kebudayaan, dan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**A. SETJEN KEMENDIKBUD RI**

1. Pagu anggaran (sementara) Setjen Kemendikbud RI RAPBN TA 2017 sebesar Rp1,850 triliun (tukin hanya di Sekjen) mengalami penurunan terhadap pagu anggaran (sementara) RAPBN TA 2016 sebesar Rp2,890 triliun (termasuk tukin untuk seluruh Kementerian).
2. Komisi X DPR RI meminta Sekjen Kemendikbud RI untuk:

- a. Mengevaluasi indikator, sasaran, satuan, target yang akan dicapai berbasis data pokok pendidikan dan realisasi satu tahun terakhir.
- b. Mensosialisasikan / mengkoordinasikan neraca pendidikan ke pemerintah daerah.
- c. Mengevaluasi dan memvalidasi kembali data dan penerima beasiswa.

**B. DITJEN KEBUDAYAAN KEMENDIKBUD RI**

1. Pagu anggaran (sementara) Ditjen Kebudayaan Kemendikbud RI RAPBN TA 2017 sebesar Rp1,877 triliun (termasuk tukin) mengalami kenaikan terhadap pagu anggaran (sementara) RAPBN TA 2016 sebesar Rp1,636 triliun (tidak termasuk tukin).
2. Komisi X DPR RI meminta Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI untuk:
  - a. mengevaluasi indikator, sasaran, satuan, target yang akan dicapai berbasis data pokok pendidikan dan realisasi satu tahun terakhir.
  - b. Menyinkronkan program peningkatan dan penguatan pelestarian budaya dengan program 10 destinasi wisata prioritas di Kemenpar RI.
  - c. Mendorong penataan dan peningkatan kualitas museum, warisan budaya, dan sejarah modern.
  - d. Mengevaluasi pagu anggaran Europalia sebesar Rp 300 miliar.
  - e. Mengkaji regulasi yang berkaitan dengan program/kegiatan peningkatan dan penguatan pelestarian budaya yang kemungkinan didanai oleh DAK.
  - f. Menghitung kembali kebutuhan anggaran, anggaran yang tersedia, dan mendorong penambahan anggaran pada RAPBN TA 2017.

**C. DITJEN DIKDASMEN KEMENDIKBUD RI**

1. Pagu anggaran (sementara) Ditjen Dikdasmen Kemendikbud RI RAPBN TA 2017 sebesar Rp 22,674 triliun (termasuk tukin) mengalami penurunan terhadap pagu anggaran (sementara) RAPBN TA 2016 sebesar Rp 27,828 triliun (tidak termasuk tukin).
2. Komisi X DPR RI meminta Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI untuk:
  - a. Mengevaluasi indikator, sasaran, satuan, target yang akan dicapai berbasis data pokok pendidikan dan realisasi satu tahun terakhir.
  - b. Menggunakan sumber data yang valid sebagai basis penentuan perencanaan dan kebijakan.
  - c. Mengevaluasi kebijakan satuan biaya dan pemanfaatan dana BOS.
  - d. Mengevaluasi data, sasaran, dan penyalur KIP, serta hasilnya disampaikan kepada Komisi X DPR RI paling lambat Oktober 2016.

**D. UMUM**

Komisi X DPR RI meminta Sekjen, Dirjen Kebudayaan, dan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI:

1. Menyampaikan perbaikan paparan dan jawaban tertulis secara komprehensif sebagai bahan pertimbangan rapat selanjutnya dan disampaikan kepada Komisi X DPR RI paling lambat 9 September 2016.

2. Perbaiki paparan sebagaimana dimaksud poin D.1 memuat sandingan indikator, sasaran, satuan, dan target antara 2016 dan 2017 sebagai bahan pengambilan kebijakan RAPBN TA 2017.
3. Mengalokasikan anggaran untuk program/kegiatan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan di setiap unit utama/satker.
4. Memisahkan alokasi anggaran gaji dan tunjangan kinerja serta jumlah pegawai di masing-masing unit utama/satker
5. Merinci anggaran gaji dan tunjangan kinerja serta jumlah pegawai di masing-masing unit utama/satker sebagai bahan penentuan kebijakan.
6. Menyampaikan anggaran kurikulum di masing-masing unit utama/satker.
7. Menyampaikan sumber dan data PNPB.
8. Menyiapkan regulasi untuk meningkatkan efektifitas penggunaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.25 WIB

KETUA RAPAT,



8 FERDIANSYAH, S.E. M.M. *15*